



dppkb
Kota Bekasi



RENCANA KERJA

Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Awal (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi tahun 2025. Dokumen ini disusun sebagai pedoman kerja selama satu tahun anggaran, sekaligus menjadi jembatan antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), serta sebagai implementasi dari pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra SKPD. Semua ini bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Bekasi.

RENJA tahun 2025 ini merupakan hasil dari berbagai upaya dan kerjasama yang melibatkan banyak pihak. Dokumen ini bukan hanya sebuah rencana, tetapi juga sebuah komitmen kami dalam menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Kami berupaya untuk selalu mengedepankan transparansi dan partisipasi dalam setiap proses perencanaan, sehingga hasil yang dicapai benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat Kota Bekasi.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan RENJA tahun 2025 ini, masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, masukan dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas di masa mendatang. Kami berkomitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri, agar rencana kerja yang disusun dapat lebih optimal dalam memberikan manfaat bagi masyarakat.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan bimbingan dan kemudahan dalam setiap langkah kita untuk mewujudkan Kota Bekasi yang lebih baik, sejahtera, dan berkelanjutan. Mari kita bersama-sama bekerja keras, berinovasi, dan berkolaborasi demi masa depan yang lebih cerah.

Bekasi, 4 September 2024

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Bekasi



Dra. Ika Indah Yarti, M.Si

Pembina Utama/ IVc

NIP. 19670114198610 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	8
1.3 Maksud dan Tujuan.....	10
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DPPKB	
TAHUN 2022	15
2.1 Evaluasi Pelaksanaan DPPKB Kota Bekasi Tahun 2022 dan Capaian Renstra Badan DPPKB Kota Bekasi.....	15
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan pada DPPKB Kota Bekasi.....	32
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi pada DPPKB	47
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	50
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	51
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN	52
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	52
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja.....	54
3.3 Program dan Kegiatan.....	56
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENGENDALIAN	
PENDUDUK DAN KELUARGA.....	71
BAB V PENUTUP	91
LAMPIRAN.....	94



PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA BEKASI

JL. Jend. Ahmad Yani No. 1 (Lt 5) kota Bekasi - Jawa Barat

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA BEKASI
NOMOR : 800.1.1.1/Kep.915-DPPKB/V/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BEKASI
TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA BEKASI SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Tahun 2025 dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Keputusan menteri Dalam negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan validasi Pemutakhiran klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D);

12. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 87 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi.

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 400.13/897-DPPKB tentang Pembahasan Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Tahun 2025 tanggal 30 Mei 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Tahun 2025.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Mengkaji dan mengevaluasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Tahun 2023 dan 2024;
 2. mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Renja Tahun 2025;
 3. mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun Renja Tahun 2025;
 4. melakukan diskusi untuk memperoleh masukan dari pihak terkait lainnya dalam rangka penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Tahun 2025; dan
 5. menyusun Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Tahun 2025 sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 31 Mei 2024

KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA,



IKA INDAH YARTI

Tembusan Yth:

1. Pj. Wali Kota Bekasi;
2. Plh. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Inspektur Daerah Kota Bekasi;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BEKASI
NOMOR : 800.1.1.1/Kep.915-DPPKB/V/2024
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BEKASI
TAHUN 2025

No.	JABATAN DALAM TIM PENYUSUNAN	NAMA/JABATAN	URAIAN TUGAS
I.	Penanggungjawab	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaKota Bekasi	Memberikan instruksi dan bertanggung jawab dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian (DPPKB) Kota Bekasi Tahun 2025.
II.	Ketua	Sekretaris DPPKB Kota Bekasi	Memberikan arahan terkait penyusunan Renja DPPKB Kota BekasiTahun 2025.
III.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan Renja DPPKB Kota Bekasi Tahun 2025.
IV.	Koordinator Bidang	1. Kepala Bidang Keluarga Berencana 2. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan danPenggerakan 3. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan Renja DPPKBKota Bekasi Tahun 2025 terkait lingkup Bidangnya masing-masing.

No.	JABATAN DALAM TIM PENYUSUNAN	NAMA/JABATAN	URAIAN TUGAS
V.	Anggota	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana.	1. mengkaji dan mengevaluasi Renja DPPKB Kota Bekasi Tahun 2022 dan 2023;
			2. mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Renja Tahun 2025;
			3. mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun Renja Tahun 2025;
			4. melakukan diskusi untuk memperoleh masukan dari pihak terkait lainnya dalam rangka penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Tahun 2025; dan
			5. menyusun Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Tahun 2025 sesuai dengan peraturan yang berlaku.
VI.	Sekretariat	1. Dr. Yeni Setdoningsih, S.ST., M.M. 2. Mohamad Said, S.Si 3. Nuraisyah Matondang, SH	Menyusun dan menghimpun administrasi seperti surat, notulensi, berita acara dan/atau laporan pelaksanaan penyusunan Renja DPPKB Kota Bekasi Tahun 2025.

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BEKASI,



IKA INDAH YARTI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam mendukung terwujudnya *good governance*, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintahan dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Kota Bekasi dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi. Dalam menjalankan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diperlukan perencanaan yang baik yang tertuang dalam rencana kerja.

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen penting yang berfungsi sebagai panduan untuk perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan di tingkat daerah. Dokumen ini menjadi alat strategis bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi prioritas pembangunan, mengalokasikan sumber daya, dan memastikan program-program berjalan efektif dan efisien. Dengan adanya Renja, setiap perangkat daerah dapat memiliki tujuan yang jelas dan terukur yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran. Hal ini sangat penting dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, Renja Perangkat Daerah juga berfungsi sebagai alat koordinasi antar sektor. Dokumen ini memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang direncanakan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah secara keseluruhan. Dengan demikian, sinergi antar perangkat daerah dapat terwujud, menghindari tumpang tindih program, dan memaksimalkan dampak positif bagi masyarakat. Selain itu, Renja juga memungkinkan pemerintah daerah untuk memantau dan mengevaluasi kinerja perangkat daerah, sehingga perbaikan dan penyesuaian dapat dilakukan secara berkala untuk mencapai hasil yang optimal.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Bekasi membuat Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D. Sehubungan dengan hal tersebut, mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarg Dan Keluarga Berencana Kota Bekasi menyusun Dokumen Renja Tahun 2025.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi membuat Renja yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Dengan adanya renja ini, diharapkan peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat, pengendalian pertumbuhan penduduk, serta peningkatan keluarga kecil berkualitas melalui upaya pengendalian tingkat kelahiran, peningkatan kualitas kesehatan reproduksi remaja, peningkatan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dan memperkuat kelembagaan dan jenjang Pelayanan KB berjalan dengan optimal.

1.1.1 Pengertian Renja

Renja adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan sesuai Peraturan Walikota Bekasi Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja OPD menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Sebagai sebuah dokumen resmi perangkat daerah, Renja mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada perangkat daerah dengan Rencana Pemerintah Daerah (RPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran. Renja disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan selanjutnya penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Dokumen Renja pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD.

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, proses penyusunan Renja terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan Renja, tahap penyusunan rancangan Renja, dan tahap penetapan Renja. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun Renja, orientasi mengenai Renja, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja yang definitif.

1.1.2 Proses Penyusunan Rencana Kerja

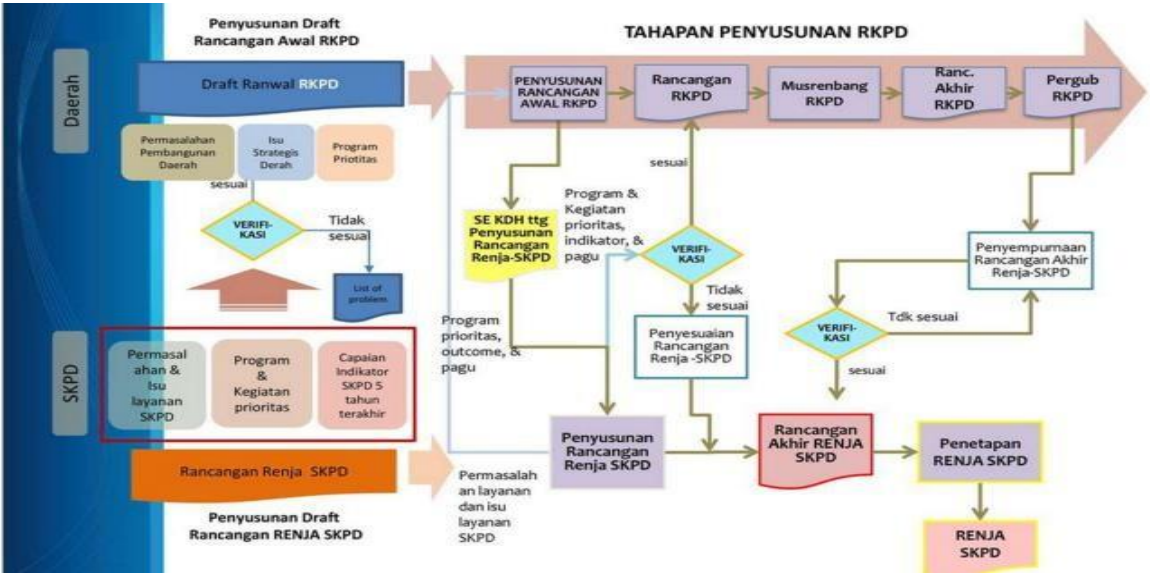
Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala menetapkan Renja untuk menjadi pedoman di lingkungan dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan :

- 1. Substansi Renja merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja yang disesuaikan dengan RKPD.
- 2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
- 3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, targetcapaian program/kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
- 4. Renja merupakan dokumen resmi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA setelah memperhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 1. 1
 Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja SKPD Kabupaten/Kota



Adapun proses penyusunan Dokumen Renja Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahapan :
 1. Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Renja
 2. Orientasi mengenai Dokumen Renja
 3. Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Dokumen Renja
 4. Penyiapan Data dan Informasi
2. Perumusan rancangan Dokumen Renja Tahapan :
 - a. Pengolahan data dan informasi
 - b. Analisis gambaran pelayanan
 - c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu berdasarkan Renstra
 - d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
 - e. Telaahan terhadap rancangan awal RPD
 - f. Perumusan tujuan dan sasaran
 - g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat
 - h. Perumusan kegiatan prioritas
 - i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- j. Penyempurnaan rancangan Renja
 - k. Pembahasan forum RPD
 - l. Penyesuaian dokumen rancangan Renja sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM
3. Penyajian Rancangan Renja
 4. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RPD
 5. Penetapan Renja

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Tahun 2025 memuat berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

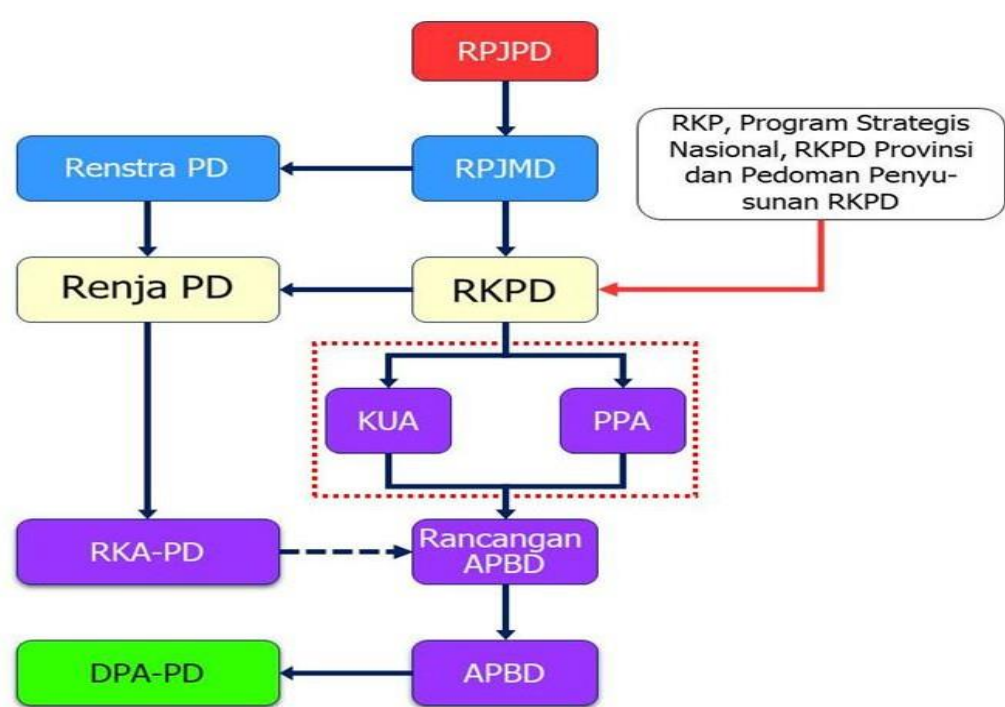
1. Program dan Kegiatan harus mengarah pada pencapaian target dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Program dan Kegiatan harus mengarah pada pencapaian target dalam Indikator Kinerja Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. Program dan Kegiatan harus Tujuan dan sasaran RPD Kota Bekasi.

1.1.2. Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Dokumen perencanaan ditingkat perangkat daerah adalah rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 3 (tiga) tahun, yang menjadi pedoman dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pembangunan bidang urusan pemerintahannya untuk mewujudkan target RPD, yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Lihat gambar 1.2.

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

(Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah) yang menjadi dasar pelaksanaan anggaran oleh perangkat daerah. Dokumen Renja PD hingga menjadi APBD adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar dibawah ini.



Gambar 1. 2
Tindak Lanjut Renja dalam Penyusunan APBD

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana Pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor No. 90 Tahun 2019 Tentang penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
- 11. Keputusan menteri Dalam negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan validasi Pemutakhiran klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan daerah;
- 12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);
- 13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri D);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 – 2018;
16. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 125 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025 dimaksudkan untuk menyeleraskan prioritas kegiatan pembangunan dengan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hal ini untuk lebih meningkatkan kualitas koordinasi perencanaan pembangunan dan media untuk menyamakan persepsi, menyatukan komitmen dan langkah-langkah konkrit kebijakan Pemerintah Kota Bekasi.

1.3.1 TUJUAN

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 ini adalah untuk mengidentifikasi keefektifan berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi rencana kerja sebagaimana diamanatkan pada Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional. Selain hal tersebut hasil/keluaran penyusunan rencana kerja ini adalah untuk merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi serta sumber pembiayaannya yang digunakan pada Tahun Anggaran 2025.

Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun kedepan merupakan penjabaran dari prioritas tujuan. Dalam upaya mencapai tujuan unit kerja perlu ditetapkan program tahunan, yaitu sebagaimana tersebut yang dituangkan dalam rencana kerja DPPKB Kota Bekasi Tahun 2025.

Untuk mewujudkan tujuan pencapaian tingkat kinerja diatas tidak

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

dapat dilaksanakan melalui suatu kegiatan yang bersamaan, tetapi harus melalui tahapan yang berkesinambungan. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut yang menjadi sarana prioritas adalah memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) agar substansi pada bab- bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/ kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Awal Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Awal Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DPPKB) TAHUN LALU

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Awal Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi.

Pada bagian ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Awal Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahunn-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Awal Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB)

Pada bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang- undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi

Pada bagian ini berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi , permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritastahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Pada bagian ini berisikan uraian mengenai proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, dan disertai penjelasan apabila ada temuan-temuan perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD Kota Bekasi yang langsung ditujukan kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Pada bagian ini dilakukan telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Pada bagian ini dirumuskan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi yang mempedomani Renstra Tahun 2024-2026.

3.3. Program dan Kegiatan

Pada bagian ini berisikan rumusan rencana program dan kegiatan disertai penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) K o t a Bekasi, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasikeduanya.

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
(DPPKB) KOTABEKASI

Pada bagian ini berisikan Tabel rencana program dan kegiatan
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB)
Kota Bekasi Tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini diuraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat
perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya
ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah
pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BEKASI TAHUN
LALU.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPPKB Kota Bekasi Tahun 2023 dan Capaian Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Tahun 2018-2023.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi memuat kajian (*Review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (Tahun n-1) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n) serta mengacu pada APBD tahun berjalan dimana untuk hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu.

Rencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Tahun 2025 selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis (Renstra) Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Tahun 2024-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya, hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan realisasi Renstra mengacu pada hasil Laporan Kinerja Tahunan dan Realisasi DPPKB yaitu perbandingan capaian dengan target baik Renja maupun Renstra.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi selama tahun 2023 dan perkiraan target Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi tahun 2025.

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil proses evaluasi dapat teridentifikasi paling tidak dua hal, yaitu sejauh mana keberhasilan proses perencanaan yang dilaksanakan oleh OPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas pengendalian Penduduk dan

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Keluarga Berencana Tahun 2024-2026 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun, dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauh mana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra tersebut juga merupakan panduan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk melaksanakan pembangunan di Kota Bekasi.

Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kota Bekasi pada dasarnya bermuara dari tujuan dan sasaran RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026, yaitu “Terwujudnya pembangunan manusia dan masyarakat yang berkualitas secara berkeadilan”. Serta sasaran “Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan pembangunan responsive gender”

Secara umum Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi telah melaksanakan fungsinya sebagai unsur pelayanan terhadap masyarakat dengan baik dan proporsional sehingga dapat menciptakan kesatuan gerak dan langkah dalam rantai kerja yang harmonis antara masyarakat dan pemerintah, indikator keberhasilan pelaksanaan fungsi ini adalah adanya suatu tingkat kepuasan baik pada masyarakat maupun pemerintah.

2.1.1.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Berikut disampaikan analisis dan evaluasi kinerja satu per satu indikator sasaran yang dicapai pada tahun 2023, Upaya perbaikan dan langkah-langkah tindak lanjut dari evaluasi pelaksanaan tahun 2023 juga telah ditempuh, semuanya bertujuan untuk memperbaiki sisi kinerja pelaksanaan Program KKBPK di Kota Bekasi. Adapun proses pemantauan dan evaluasi yang telah dilakukan adalah pelaksanaan Rapat Pengendalian Program dan Anggaran secara rutin dan berkala. Pengukuran kinerja dilakukan untuk membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang tercantum dalam perjanjian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Tahun 2022 dan 2023. Ada dua rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja.

Berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah.

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 3. 1
Capaian Kinerja DPPKB Kota Bekasi Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Mempertahankan Kesertaan Ber-KB	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	persen	28,5	11,10	38,95	30	11,10	28,5
		Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	persen	26,385	64,91	246,01	23,70	64,91	26,38
		Unmeetneed (Wanita Kawin yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangkan Kehamilan tetapi tidak menggunakan alat/cara kontrasepsi)	persen	5,50	34,97	15,72	5,00	34,97	5,50

Sumber Data : Seksi Data DPPKB Kota Bekasi

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2023 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra DPPKB Kota Bekasi tahun 2018-2023. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk mencapai sasaran startegis yaitu Mempertahankan Kesertaan Ber-KB, diukur melalui 3 (tiga) indikator yaitu : Pertama Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang dengan capaian kinerja sebesar 30 persen (tidak tercapai), kedua Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi dengan capaian kinerja sebesar 23,70 (tercapai), ketiga Unmeetneed (Wanita yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangkan kehamilan tetapi tidak menggunakan alat/cara kontrasepsi) sebesar 5,00 persen (tidak tercapai) maka dapat dikatakan bahwa sasaran strategis DPPKB Kota Bekasi tahun 2023 belum tercapai 100% hal ini disebabkan karena tingginya migrasi penduduk di Kota Bekasi.

Secara umum Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi telah melaksanakan fungsinya sebagai unsur pelayanan terhadap masyarakat dengan baik dan proporsional sehingga dapat menciptakan kesatuan gerak dan langkah dalam rantai kerja yang harmonis antara masyarakat dan pemerintah, indikator keberhasilan pelaksanaan fungsi ini adalah adanya suatu tingkat kepuasan baik pada masyarakat maupun pemerintah.

Berikut disampaikan analisis dan evaluasi kinerja satu per satu indikator sasaran yang dicapai pada tahun 2022 dan 2023 sebagai berikut ini :

1. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target tahun 2023 sebesar 30% Persen, sementara realisasi mencapai 11,10 persen maka capaian kinerja tahun 2023 sebesar 28,5%, dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada Tahun 2023 tidak tercapai.

Persentase penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern adalah perbandingan antara Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif MKJP (peserta KB yang saat ini menggunakan MKJP) dibandingkan terhadap Total

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

seluruh peserta KB aktif pada periode yang sama yang dinyatakan dalam persentase. Dalam menjalankan program KKBPK, salah satu indikator keberhasilannya adalah peningkatan persentase peserta KB Aktif MKJP. Tahun 2023 target ini tidak dapat dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk Kota Bekasi. Dari target persentase untuk peserta KB aktif MKJP sebesar 28,5 persen, berdasarkan data SKAP 2020 peserta KB aktif MKJP sudah mencapai 38,95%. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, ada penurunan realisasi persentase peserta KB aktif MKJP dibandingkan target kinerja, yaitu dari 90,95 persen di tahun 2022 menjadi 38,95 persen di tahun 2023.

- Faktor Penghambat Penggunaan MKJP :
- Minat masyarakat terhadap penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) masih rendah;
 - Masih rendahnya partisipasi pria dalam penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang;
 - Alat / sarana prasarana masih kurang memadai untuk pelayanan MOW;
 - Pelaksanaan program KB MKJP terlaksana dengan baik namun belum maksimal.

- Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan :
- Prosentase penggunaan kontrasepsi jangka Panjang (MKJP) seperti MOP, MOW, IUD dan Implant di Kota Bekasi makin meningkat seiring dengan pengetahuan masyarakat akan pentingnya mengatur kelahiran dengan menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang efektif dan efisein;
 - Kondisi tersebut didukung pula oleh akses;
 - Disamping itu kehadiran petugas lapangan keluarga berencana kualitas pelayanan Keluarga Berencana yang memadai yang tersebar di Kota Bekasi dan jaringan kader KB yang makin intens di masyarakat;
 - Dukungan pemerintah daerah yang secara kontinyue menyelenggarakan pelayanan KB pada setiap momentum kegiatan pada hari-hari besar nasional antara lain pada HUT Kota Bekasi, TNI Manunggal KB kesehatan, Hari Keluarga Nasional, HUT RI, Hari Kontrasepsi se Dunia, Kesrak PKK,

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

KB dan Kesehatan, Penutupan TMKK KB Kesehatan.

Jumlah Penggerakan Pelayanan KB MKJP dapat diartikan jumlah penggerakan Pelayanan KB yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi bekerja sama dengan Ikatan Bidan di Kota Bekasi, khusus untuk Metode MKJP, yaitu :

- IUD
- Implant
- MOW dan
- MOP

2. Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi.

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target tahun 2022 sebesar 26,385 Persen, sementara realisasi mencapai 64,91 persen maka capaian kinerja tahun 2023 sebesar 23,707 persen, dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada Tahun 2023 tercapai. Persentase penurunan angka Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi didefinisikan sebagai proporsi pemakai alat atau cara KB yang berhenti memakai alat atau cara tersebut dalam waktu satu tahun setelah mulai menggunakan alat/cara KB. Persentase penurunan angka berlangsung pemakaian kontrasepsi diharapkan dapat serendah mungkin. Target Persentase tingkat putus pakai Kontrasepsi pada Tahun 2023 ditetapkan sebesar 49,93 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, ada peningkatan persentase realisasi dibandingkan target kinerja, yaitu dari 24,60 persen di tahun 2022 menjadi 26,38 persen di tahun 2023.

3. Persentase Kebutuhan Ber KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need).

Berdasarkan tabel tersebut diatas bahwa target tahun 2023 sebesar 5,00 Persen, sementara realisasi mencapai 19,86 persen maka capaian kinerja tahun 2023 sebesar 15,72 persen, dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada Tahun 2023 tidak tercapai.

Persentase Kebutuhan pelayanan KB yang tidak terpenuhi (unmet need) didefinisikan sebagai berikut :

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- Persentase PUS yang tidak ingin mempunyai anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara KB;
- Wanita usia subur yang tidak menggunakan alat/cara kontrasepsi namun menginginkan penundaan kehamilan (penjarangan) atau berhenti sama sekali (pembatasan).

Tingginya angka Unmet Need KB dalam permasalahan program KB mengindikasikan rendahnya prevalensi kontrasepsi yang berakibat tingginya angka kelahiran dan memicu terjadi ledakan penduduk. Hasil 2023 menunjukan bahwa angka unmet need di Kota Bekasi adalah 19,86 persen, belum mencapai target Unmet Need di Jawa Barat 13,3 persen dan yang ditetapkan BKKBN sebesar 10,15 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, ada penurunan persentase realisasi dibandingkan target kinerja, yaitu dari 34,97 persen di tahun 2022 menjadi 19,86 persen di tahun 2023.

Indikator Sasaran Unmet Need Kota Bekasi makin meningkat, seharusnya makin menurun dengan CPR yang makin tinggi dengan komposisi pemakaian alat kontrasepsi jangka panjang yang meningkat maka Pasangan Usia Subur (PUS) Unmeet Need makin turun, akan tetapi realisasinya makin meningkat.

Hal-hal yang menyebabkan sebagai berikut :

- Unmet Need Kota Bekasi meningkat karena Pasangan usia Subur (PUS) secara total didominasi PUS muda paritas rendah, artinya PUS muda yang masih berencana ingin anak lagi.
- Unmet Need Kota Bekasi terdiri dari PUS migran yang berasal dari daerah lain dan menetap di Kota Bekasi;
- Unmet Need Kota Bekasi sebagian dipengaruhi oleh makin panjangnya masa subur (PUS umur 49-50 Tahun).
- Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap berbagai macam kontrasepsi dengan kelebihan dan kelemahannya masing-masing

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- Rasa takut terhadap efek samping yang ditimbulkan oleh penggunaan kontasepsi akan menyebabkan penolakan terhadap pemakaian kontrasepsi.

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPPKB dan Pencapaian Renstra DPPKB s/d Tahun 2023

Kode	Sasaran RPKD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan		
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16	17	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						100 %	35.032.578.170,00	10,27	2.225.072.764,00	28,02	5.509.301.478,00	10,03	7.687.943.018,00	51,88	-15.422.317.260,00	100,24	0,00	100,21	0,00	100,24	0,00					
	2.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						100 %	35.032.578.170,00	10,27	2.225.072.764,00	28,02	5.509.301.478,00	10,03	7.687.943.018,00	51,88	-15.422.317.260,00	100,24	0,00	100,21	0,00	100,24	0,00					
	2.14.1	Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00 %	2.879.950.000.000,00	99,53 %	12.054.363.732,00	100,00 %	13.114.600.170,00	23,26	2.061.583.264,00	19,04	3.661.840.979,00	19,79	2.719.511.118,00	38,48	3.378.795.048,00	100,57	11.821.730.409,00	100,57	90,14	100,57	11.821.730.409,00	100,57	0,41		
	1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					100 %	4.000.000,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	60,00	3.700.400,00	100,00	3.700.400,00	100,00	92,51	100,00	3.700.400,00	100,00	0,00			
	1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					5,00 Laporan	4.000.000,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3.700.400,00	5,00	3.700.400,00	100,00	92,51	5,00	3.700.400,00	5,00	0,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																			100,00	92,51	100,00	3.700.400,00	100,00	0,00				
Predikat kinerja Kegiatan																			Sangat Tinggi									
	1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keuangan Perangkat Daerah					100 %	10.881.357.000,00	11,99	1.714.070.024,00	11,99	3.171.948.530,00	0,00	2.228.924.976,00	80,61	2.669.789.514,00	104,59	9.784.733.044,00	104,59	89,92	104,59	9.784.733.044,00	104,59	0,34			
	1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					588,00 Orang/bulan	10.879.357.000,00	141,00	1.714.070.024,00	141,00	3.171.948.530,00	0,00	2.228.924.976,00	360,00	2.667.815.514,00	642,00	9.782.759.044,00	109,18	89,92	642,00	9.782.759.044,00	642,00	0,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

1.2.02.5		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1,00 Laporan	2.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		1.974.000,00	1,00	1.974.000,00	100,00	98,70	1,00		1.974.000,00	1,00	0,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana					
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																										104,59	89,92	104,59	9.784.733.044,00	104,59	0,34			
Predikat kinerja Kegiatan																										Sangat Tinggi								
			Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00 %				100,00 %																										
1.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah					100 %	341.967.300,00	32,13	130.623.000,00	17,68	41.322.254,00	15,99	5.670.000,00	34,20	132.798.620,00	100,00	310.413.874,00	100,00	90,77	100,00			310.413.874,00	100,00	0,01							
1.2.06.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1,00 Paket	19.997.900,00	1,00	0,00	0,00	19.538.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	19.538.220,00	100,00	97,70	1,00			19.538.220,00	1,00	0,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana						
1.2.06.4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					4,00 Paket	155.999.500,00	3,00	130.623.000,00	0,00	6.551.000,00	1,00	0,00	0,00	12.733.000,00	4,00	149.907.000,00	100,00	96,09	4,00			149.907.000,00	4,00	0,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana						
1.2.06.5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					365,00 Paket	44.519.900,00	91,00	0,00	32,00	0,00	80,00	0,00	162,00	28.834.500,00	365,00	28.834.500,00	100,00	64,77	365,00			28.834.500,00	365,00	0,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana						
1.2.06.6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12,00 Dokumen	20.000.000,00	3,00	0,00	3,00	5.670.000,00	3,00	5.670.000,00	3,00	7.560.000,00	12,00	18.900.000,00	100,00	94,50	12,00			18.900.000,00	12,00	0,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana						
1.2.06.8		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					1,00 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	9.875.000,00	1,00	9.875.000,00	100,00	98,75	1,00			9.875.000,00	1,00	0,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana						
1.2.06.9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					4,00 Laporan	81.490.000,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	73.796.120,00	4,00	73.796.120,00	100,00	90,60	4,00			73.796.120,00	4,00	0,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana						
1.2.06.10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					50,00 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	20,00	9.563.034,00	20,00	0,00	10,00	0,00	50,00	9.563.034,00	100,00	95,63	50,00			9.563.034,00	50,00	0,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana						
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																										100,00	90,77	100,00	310.413.874,00	100,00	0,01			
Predikat kinerja Kegiatan																										Sangat Tinggi								
1.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100 %	1.522.566.870,00	3,41	216.890.240,00	29,55	349.479.141,00	15,91	332.339.516,00	51,14	495.666.240,00	100,00	1.394.375.137,00	100,00	91,58	100,00			1.394.375.137,00	100,00	0,05							
1.2.08.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12,00 Laporan	70.000.000,00	0,00	0,00	6,00	11.733.750,00	3,00	0,00	3,00	21.306.850,00	12,00	33.040.600,00	100,00	47,20	12,00			33.040.600,00	12,00	0,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana						
1.2.08.4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					44,00 Laporan	1.452.566.870,00	3,00	216.890.240,00	4,00	337.745.391,00	3,00	332.339.516,00	34,00	474.359.390,00	44,00	1.361.334.537,00	100,00	93,72	44,00			1.361.334.537,00	44,00	0,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana						

PARAF KOORDINASI :

Kepala DPPKB

Kepala Bappelitbangda

Kabag Hukum

Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																				100,00	91,58	100,00	1.394.375.137,00	100,00	0,05		
Predikat kinerja Kegiatan																				Sangat Tinggi							
			Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00 %				100,00 %																			
1.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100 %	364.709.000,00	29,11	0,00	14,45	99.091.054,00	43,23	152.576.626,00	13,21	76.840.274,00	100,00	328.507.954,00	100,00	90,07	100,00	328.507.954,00	100,00	0,01		
1.2.09.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya					5,00 Unit	75.000.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	48.827.326,00	1,00	25.307.874,00	5,00	74.135.200,00	100,00	98,85	5,00	74.135.200,00	5,00	0,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
1.2.09.2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					70,00 Unit	140.000.000,00	15,00	0,00	12,00	0,00	20,00	54.442.800,00	23,00	51.532.400,00	70,00	105.975.200,00	100,00	75,70	70,00	105.975.200,00	70,00	0,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
1.2.09.6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					50,00 Unit	49.709.000,00	15,00	0,00	12,00	0,00	23,00	49.306.500,00	0,00	0,00	50,00	49.306.500,00	100,00	99,19	50,00	49.306.500,00	50,00	0,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
1.2.09.9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					12,00 Unit	100.000.000,00	3,00	0,00	2,00	99.091.054,00	7,00	0,00	0,00	0,00	12,00	99.091.054,00	100,00	99,09	12,00	99.091.054,00	12,00	0,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																				100,00	90,07	100,00	328.507.954,00	100,00	0,01		
Predikat kinerja Kegiatan																				Sangat Tinggi							
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																				100,57	90,14	100,57	11.821.730.409,00	100,57	0,41		
Predikat kinerja Program																				Sangat Tinggi							
2.14.2	Meningkatnya kesejahteraan sosial dan keluarga	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Cakupan Data Mikro Keluarga	80,00 %	2.560.000.000,00	100,00 %	111.447.400,00	80,00 %	267.950.000,00	0,00	0,00	16,67	5.875.000,00	0,00	159.676.400,00	83,33	93.972.000,00	100,00	259.523.400,00	80,00	96,86	100,00	259.523.400,00	100,00	10,14		
2.2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Cakupan Data Mikro 75,5 %					100 %	131.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.275.000,00	0,00	123.906.900,00	100,00	3.072.000,00	100,00	129.253.900,00	100,00	98,07	100,00	129.253.900,00	100,00	5,05		
2.2.01.2		Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota					1,00 Dokumen	131.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.275.000,00	0,00	123.906.900,00	1,00	3.072.000,00	1,00	129.253.900,00	100,00	98,07	1,00	129.253.900,00	1,00	0,05	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																				100,00	98,07	100,00	129.253.900,00	100,00	5,05		
Predikat kinerja Kegiatan																				Sangat Tinggi							
2.2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Data Mikro 75,5 %					100 %	136.150.000,00	0,00	0,00	25,00	3.600.000,00	0,00	35.769.500,00	75,00	90.900.000,00	100,00	130.269.500,00	100,00	95,68	100,00	130.269.500,00	100,00	5,09		

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2.2.02.11		Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Cakupan Laporan Program Bangsa Kencana					100,00 persen	102.550.000,00	0,00		0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	35.769.500,00	100,00	57.300.000,00	100,00	96.669.500,00	100,00	94,27	100,00	96.669.500,00	100,00	0,04	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
2.2.02.12		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga					12,00 Laporan	33.600.000,00	0,00		0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	33.600.000,00	12,00	33.600.000,00	100,00	100,00	12,00		33.600.000,00	12,00	0,01	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																					100,00	95,68	100,00	130.269.500,00	100,00	5,09		
Predikat kinerja Kegiatan																					Sangat Tinggi							
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																					100,00	96,86	100,00	259.523.400,00	100,00	10,14		
Predikat kinerja Program																					Sangat Tinggi							
2.14.3	Meningkatnya kesejahteraan sosial dan keluarga	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan. Menikah	77,50 %	3.120.000.000,00	96,09 %	3.021.224.208,00	77,50 %	7.877.728.000,00	3,67	163.489.500,00	27,43	937.753.499,00	2,97	1.718.785.500,00	65,94	3.199.001.234,00	100,00	6.019.029.733,00	77,50	76,41	100,00	6.019.029.733,00	100,00	192,92			
2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembanguna Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang					100 %	881.675.000,00	0,00	53.989.500,00	25,00	290.011.500,00	0,00	222.887.500,00	75,00	200.441.734,00	100,00	767.330.234,00	100,00	87,03	100,00	767.330.234,00	100,00	24,59			
3.2.01.4		Promosi dan KIE Program KKBP Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang					10,00 Kegiatan	232.475.000,00	0,00	53.989.500,00	0,00	83.761.500,00	0,00	92.680.000,00	10,00	0,00	10,00	230.431.000,00	100,00	99,12	10,00	230.431.000,00	10,00	0,07	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		
			Terlaksananya promosi dan KIE program bangsa kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana Melalui media cetak dan elektronik serta media luar ruang					1,00 dokumen		0,00		0,00		0,00	1,00		1,00		100,00		1,00		1,00					
3.2.01.6		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBP melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsakencana melalui rakor kecamatan, rakor desa dan minilock					12,00 Laporan	156.000.000,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	61.920.000,00	6,00	89.280.000,00	12,00	151.200.000,00	100,00	96,92	12,00	151.200.000,00	12,00	0,05	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		
3.2.01.7		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KBPK	Laporan hasil pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan bangsa kencana					12,00 laporan	493.200.000,00	0,00	0,00	6,00	206.250.000,00	0,00	68.287.500,00	6,00	111.161.734,00	12,00	385.699.234,00	100,00	78,20	12,00	385.699.234,00	12,00	0,12	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																					100,00	87,03	100,00	767.330.234,00	100,00	24,59		
Predikat kinerja Kegiatan																					Sangat Tinggi							
3.2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Pencapaian Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR 77 persen					100 %	320.000.000,00	17,41	0,00	11,61	220.281.999,00	0,00	57.050.000,00	70,98	38.616.200,00	100,00	315.948.199,00	100,00	98,73	100,00	315.948.199,00	100,00	10,13			

21

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

3.2.02.1		Pembinaan IMP dan Program KBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Terlaksananya pengerakan pembinaan IMP					8,00 orang	8.000.000,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	8.000.000,00	8,00	8.000.000,00	100,00	100,00	8,00	8.000.000,00	8,00	0,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana										
3.2.02.2		Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia					56,00 Unit	100.000.000,00	15,00	0,00	12,00	91.811.999,00	0,00	0,00	29,00	6.115.200,00	56,00	97.927.199,00	100,00	97,93	56,00	97.927.199,00	56,00	0,03	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana										
3.2.02.4		Pengerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Cakupan Laporan Program Bangga Kencana					100,00 persen	212.000.000,00	0,00	0,00	0,00	128.470.000,00	0,00	57.050.000,00	100,00	24.501.000,00	100,00	210.021.000,00	100,00	99,07	100,00	210.021.000,00	100,00	0,07	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana										
			Jumlah kader yang mengikuti pengerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)					560,00 orang		100,00		0,00		0,00		460,00		560,00	100,00		560,00		560,00													
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																				100,00	98,73	100,00	315.948.199,00	100,00	10,13											
Predikat kinerja Kegiatan																				Sangat Tinggi																
3.2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi					100 %	5.916.053.000,00	0,00	7.500.000,00	28,75	308.538.000,00	6,27	1.137.389.000,00	64,98	2.746.578.300,00	100,00	4.200.005.300,00	100,00	70,99	100,00	4.200.005.300,00	100,00	134,62											
3.2.03.1		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya					12,00 Laporan	291.300.000,00	0,00	7.500.000,00	6,00	116.434.500,00	0,00	22.260.000,00	6,00	62.576.500,00	12,00	208.771.000,00	100,00	71,67	12,00	208.771.000,00	12,00	0,07	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana										
3.2.03.2		Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB					0,00 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500.000,00	0,00	49.500.000,00	0,00	99,00	0,00	49.500.000,00	0,00	0,02	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana										
			Jumlah Petugas yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB					10,00 Orang		0,00		0,00	0,00	0,00	10,00		10,00		100,00		10,00		10,00													
3.2.03.3		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)					6.212,00 Orang	2.447.123.000,00	0,00	0,00	58,00	192.103.500,00	0,00	189.039.000,00	6.154,00	1.126.445.800,00	6.212,00	1.507.588.300,00	100,00	61,61	6.212,00	1.507.588.300,00	6.212,00	0,48	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana										
3.2.03.5		Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB					1,00 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	47.190.000,00	0,00	0,00	1,00	47.190.000,00	100,00	94,38	1,00	47.190.000,00	1,00	0,02	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana										
3.2.03.6		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB					234,00 Unit	1.832.750.000,00	0,00	0,00	18,00	0,00	132,00	871.400.000,00	84,00	356.900.000,00	234,00	1.228.300.000,00	100,00	67,02	234,00	1.228.300.000,00	234,00	0,39	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana										

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

3.2.03.8		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah laporan hasil pembinaan pelayanan keluarga berencana kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya					100,00 laporan	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	80.000.000,00	100,00	80.000.000,00	100,00	66,67	100,00	80.000.000,00	100,00	0,03	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
3.2.03.9		Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan					1.975,00 Orang	974.880.000,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	7.500.000,00	1.973,00	930.466.000,00	1.975,00	937.966.000,00	100,00	96,21	1.975,00	937.966.000,00	1.975,00	0,30	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
3.2.03.10		Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi					20,00 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000.000,00	20,00	99.000.000,00	100,00	99,00	20,00	99.000.000,00	20,00	0,03	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
3.2.03.13		Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria					90,00 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	41.690.000,00	90,00	41.690.000,00	100,00	83,38	90,00	41.690.000,00	90,00	0,01	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																				100,00	70,99	100,00	4.200.005.300,00	100,00	134,62		
Predikat kinerja Kegiatan																				Sangat Tinggi							

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

3.2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pencapaian Angka Pemakalan Kontrasepsi/CPR 77 persen						100 %	760.000.000,00	0,00	102.000.000,00	58,00	118.922.000,00	0,00	301.459.000,00	42,00	213.365.000,00	100,00	735.746.000,00	100,00	96,81	100,00	735.746.000,00	100,00	23,58		
3.2.04.3		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB						25,00 Kampung	510.000.000,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	284.256.500,00	0,00	213.365.000,00	25,00	497.621.500,00	100,00	97,57	25,00	497.621.500,00	25,00	0,16	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
3.2.04.4		Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB						25,00 Laporan	250.000.000,00	0,00	102.000.000,00	4,00	118.922.000,00	0,00	17.202.500,00	21,00	0,00	25,00	238.124.500,00	100,00	95,25	25,00	238.124.500,00	25,00	0,08	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																				100,00	96,81	100,00	735.746.000,00	100,00	23,58			
Predikat kinerja Kegiatan																				Sangat Tinggi								
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																				100,00	76,41	100,00	6.019.029.733,00	100,00	192,92			
Predikat kinerja Program																				Sangat Tinggi								
2.14.4	Meningkatnya kesejahteraan sosial dan keluarga	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Cakupan anggota poktan yang ber KB	60,00 %	1.850.000.000,00	87,60 %	3.058.378.997,00	60,00 %	13.772.300.000,00	0,00	0,00	65,83	903.832.000,00	11,67	3.089.970.000,00	22,50	8.212.857.200,00	100,00	12.206.659.200,00	60,00	88,63	100,00	12.206.659.200,00	100,00	659,82			
4.2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah PPKS Aktif 3di Kecamatan Perentase Cakupan Anggota Poktan ber-KB					100 %	13.772.300.000,00	0,00	0,00	65,83	903.832.000,00	11,67	3.089.970.000,00	22,50	8.212.857.200,00	100,00	12.206.659.200,00	100,00	88,63	100,00	12.206.659.200,00	100,00	659,82			
4.2.01.2		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga					18,00 Unit	360.000.000,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.800.000,00	18,00	231.800.000,00	100,00	64,39	18,00	231.800.000,00	18,00	0,13	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		
4.2.01.5		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)					500,00 Orang	12.966.700.000,00	0,00	0,00	500,00	843.500.000,00	0,00	3.084.150.000,00	0,00	7.641.332.600,00	500,00	11.568.982.600,00	100,00	89,22	500,00	11.568.982.600,00	500,00	6,25	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		
			Jumlah PPKS Aktif di Kecamatan 3, Perentase Cakupan Anggota Poktan ber-KB 50%					100 %																				
4.2.01.6		Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)					24,00 Kelompok	96.000.000,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	2.860.000,00	0,00	87.863.100,00	24,00	90.723.100,00	100,00	94,50	24,00	90.723.100,00	24,00	0,05	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

4.2.01.7		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)					12,00 Laporan	249.600.000,00	0,00	0,00	2,00	26.332.000,00	7,00		0,00	3,00	204.826.500,00	12,00	231.158.500,00	100,00	92,61	12,00	231.158.500,00	12,00	0,12	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana							
4.2.01.11		Advokasi dan Promosi IPK	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi Ibangga (Indeks Pembangunan Keluarga)					80,00 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	10,00	34.000.000,00	0,00	2.960.000,00	70,00	47.035.000,00	80,00	83.995.000,00	100,00	84,00	80,00	83.995.000,00	80,00	0,05	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana								
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																				100,00	88,63	100,00	12.206.659.200,00	100,00	659,82									
Predikat kinerja Kegiatan																				Sangat Tinggi														
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																				100,00	88,63	100,00	12.206.659.200,00	100,00	659,82									
Predikat kinerja Program																				Sangat Tinggi														
RATA -RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)																				100,21	0,00	100,21	0,00											
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																				Sangat Tinggi														

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi

Analisis kinerja pelayanan DPPKB Kota Bekasi berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan DPPKB berdasarkan tugas dan fungsi DPPKB Kota Bekasi serta ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan DPPKB. Untuk menganalisis kinerja pelayanan DPPKB digunakan indikator sasaran, program, dan kegiatan DPPKB Kota Bekasi serta hasil analisis standar kebutuhan pelayanan di DPPKB Kota Bekasi. Berikut pencapaian kinerja pelayanan DPPKB Kota Bekasi.

Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap Perangkat Daerah untuk jangka waktu satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari tahapan sebagai berikut: (1) persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah, (2) penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, (3) penyusunan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dan (4) penetapan Renja Perangkat Daerah dengan indikator.

Berdasarkan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi yang berkaitan dengan penyusunan dokumen pengendalian penduduk dan keluarga berencana, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

- 1. Masih kurangnya jumlah SDM ASN DPPKB yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan dengan tugas dan fungsinya;
- 2. Masih kurangnya jumlah SDM DPPKB Non ASN Tenaga Penggerak Kelurahan (TPK) yang memiliki kemampuan dan kompetensi sebagai petugas lini lapangan;
- 3. SOP untuk sebagian kegiatan pada DPPKB belum disusun serta SOP yang telah ada belum diterapkan secara optimal;
- 4. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan DPPKB;
- 5. Belum terintegrasinya program lintas sektoral bagi yang membutuhkan data dan informasi koordinasi dari instansi lain;
- 6. Menurunnya animo masyarakat untuk partisipasi dalam program Keluarga Berencana;

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

7. Dalam perkembangannya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, diharapkan dapat menjadi organisasi perangkat daerah yang lebih responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas pelayanan melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM, memantapkan kelembagaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

Tabel 2.7.

Pencapaian Kinerja Pelayanan DPPKB Kota Bekasi

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Realisasi Capaian			Proyeksi Capaian		CatatanAnalisis	
				Tahun2022	Tahun2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun2022	Tahun2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Presentasi penggunaan kontrasepsi jangka Panjang		30%	28,5%	30%	30 %	31,82%	31,44	27,5%	28,5%
2	Presentasi tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi		23,70%	26,38%	23,70%	34,95%	21,62%	25,38	29,165%	26,38%
3	Unmet Need		5,00	5,70%	5%	6,30%	9,43%	9.04	5,75%	5,50%
4	Nilai AKIP			74.50%	75%	73.06%	-	72,06	74,00%	74.5%

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2.3. .Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penerapan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas sesuaidengan Tujuan dan sasaran RPD;
- b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkupbidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-bidangdan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Pembinaan administrasi perkantoran;
- e. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang pengendalian penduduk dan keluaraga berencana serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD, Lembaga/Instansi terkait dalam rangkapenyelenggaraan kegiatan Dinas;
- f. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;
- g. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang;
- h. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan Laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya DPPKB menghadapi berbagai isu atau permasalahan sosial di masyarakat, isu-isu didalam penyelenggaraan tugas yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi *Unmetneed*.
- b. Masih rendahnya yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang(MKJP) bagi akseptor baru dan akseptor aktif.
- c. Masih rendahnya partisipasi laki-laki dalam ber-KB.
- d. Jumlah penduduk muda tinggi.
- e. Partisipasi keluarga ikut kelompok kegiatan Poktan masih rendah.

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Dalam rangka mendukung pencapaian IPM Kota Bekasi yang pelaksanaannya mengacu pada 17 tujuan pokok SDG's, khususnya yang terkait dengan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yakni:

- a. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun (Tanpa Kemiskinan);
- b. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi danmendorong pertanian yang berkelanjutan (Tanpa Kelaparan);
- c. Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan bagi semuaorang di segala usia (Kesehatan yang baik dan kesejahteraan);
- d. Menjamin Pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang (Pendidikan Berkualitas);
- e. Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan (Kesetaraan Gender);
- f. Menjamin kesediaan dan Pengelolaan air serta Sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang (Air Bersih dan Sanitasi);
- g. Menjamin akses energy yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan serta modern bagi semua orang (Energi Bersih dan Terjangkau);
- h. Mendorong Pertumbuhan ekonomi dan Pekerjaan yang layak (Pertumbuhan ekonomi dan Pekerjaan yang layak);
- i. Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi (Industri, Inovasi dan Infrastruktur);
- j. Menjadikan Kota dan pemukiman manusia inklusif aman, berketahan dan berkelanjutan (Keberlanjutan Kota dan Komunitas);
- k. Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antra Negara (Mengurangi Kesenjangan);
- l. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang berkelanjutan (Konsumsi dan Produksi Bertanggung jawab);
- m. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim serta dampaknya (Aksi Terhadap Iklim);
- n. Melestarikan dan menggunakan samudra, lautan dan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan (Kehidupan Bawah Laut);
- o. Melindungi, memperbaharui serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hitan secara berkelanjutan, mengurangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati (Kehidupan di darat);

- p. Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di seluruh tingkatan (Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian).

Tantangan yang dihadapi:

- a. Tingginya Migrasi

Rata-rata kenaikan jumlah penduduk di Kota Bekasi mencapai 3% dari total jumlah penduduk 2.592.819 jiwa atau sekitar 77.785 orang pertahun. Menurut data terakhir Pemerintah Kota Bekasi diprediksi jumlah penduduk di wilayah Kota Bekasi bakal meningkat pada tahun 2023, yaitu mencapai 3,6 juta jiwa. (Sumber data: <http://www.beritasatu.com>)

- b. Laju Pertumbuhan Penduduk Cukup Tinggi

Data menurut Susenas Tahun 2010-2016 LPP Jawa Barat 1,54, sedangkan untuk Indonesia 1,36. Selama dua puluh lima tahun mendatang terus meningkat yaitu dari 1.56 juta pada tahun 2010 menjadi 0.69 juta pada tahun 2035. Indonesia dari 1.38 juta pada tahun 2010 menjadi 0.62 juta pada tahun 2035. LPP Kota Bekasi sebesar 2,38 (SDKI Tahun 2017). Hal ini dipengaruhi oleh tingkat migrasi yang tinggi.

- c. Kurangnya tenaga Penyuluh Lapangan

Kota Bekasi saat ini hanya mempunyai 1:1 tenaga penyuluh sedangkan idealnya adalah satu kelurahan mempunyai dua tenaga penyuluh.

- d. *UNMET NEED* Tinggi

Pasangan usia subur yang tidak ingin punya anak tetapi belum berKB dan pasangan usia subur yang ingin anak ditunda tetapi belum berKB masih tinggi. Hal ini terkait dengan PUS Muda paritas rendah yang masih tinggi, disamping itu Migrasi yang datang ke Kota Bekasi makin banyak.

- e. Masih Rendahnya Partisipasi Pria dalam ber-KB

Peluang yang ada:

- a. Dukungan sarana dan prasarana dari BKKBN dan BPJS BKKBN menyediakan alokon, tenaga PLKB yang melakukan penggerakan pelayanan MKJP, dan BPJS Kesehatan menyediakan jasa pelayanan KB.
- b. Komitmen/kesepakatan bersama antara DPPKB – Dinkes – IBI Kota Bekasi. Keterkaitan arah kebijakan dan program/kegiatan prioritas yang akan

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

disinergikan melalui kemitraan DPPKB – Dinkes - IBI Kota Bekasi.

Rencana program dan kegiatan dalam revisi Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran dari RPD Pemerintah Kota Bekasi yang terdiri dari program yang menunjang secara langsung pencapaian tujuan dan sasaran program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi.

Rencana Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2025 adalah:

1. Tema adalah Peningkatan Masyarakat dan Kapasitas Ekonomi;
2. Prioritas:
 - Peningkatan akses masyarakat pada pendidikan yang lebih tinggi;
 - Peningkatan kapasitas dan kualitas layanan pendidikan;
 - Penguatan kapasitas dan peningkatan kualitas layanan kesehatan;
 - Penguatan keshalehan spiritual, ketahanan sosial dan kearifan budaya;
 - Pengembangan *creative society*;
3. Sasaran:

Memperluas akses pendidikan dasar, menengah dan tinggi bagi masyarakat Kota Bekasi;

 - Meningkatnya kualitas layanan pendidikan yang didukung IT;
 - Meningkatnya akses layanan Kesehatan masyarakat;
 - Terwujudnya kehidupan sosial budaya multikultur dan kehidupan masyarakat yang ihsan;
 - Meningkatnya nilai PDRB sektor ekonomi kreatif;
 - Meningkatnya toleransi, kesetaraan dan kerjasama sosial.

Dinas Pengendalian Penduduk mendukung Prioritas Penguatan kapasitas dan peningkatan kualitas layanan kesehatan dengan sasaran meningkatnya akses layanan Kesehatan masyarakat melalui 4 Program dan Kegiatan maka diperlukan ini, diperlukan:

1. Penambahan pagu kegiatan OPD, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
2. Adanya penambahan target capaian, lokasi dan penyesuaian dengan kebutuhan tahun berjalan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas berdasarkan RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada tahun anggaran 2025 ada usulan Program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diusulkan melalui dari Musrembang Kelurahan hal ini dimaksudkan untuk mengakomodir seluruh kebutuhan Masyarakat lebih tepat sasaran dan tepat guna. dimungkinkan karena program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dirasa cukup oleh masyarakat dalam mengakomodir kebutuhan Masyarakat. Dimulai dari Pramusrembang kemudian Penyusunan RPD baru penyusunan Rancangan Renja Dians Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi, kemudian dilanjutkan dengan Musrembang Kecamatan, Musrembang Kota, Rancangan Akhir RKPD 2025, Penetapan RKPD 20253 baru Rancangan Akhir dilanjutkan dengan Penetapan Renja Dinas.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA BEKASI

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang kewenangannya secara konkuren menjadi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Dalam Undang–Undang ini secara tegas dijelaskan 4 (empat) Sub urusan yang menjadi kewenangan bersama, yaitu:

- a. Pengendalian Penduduk;
- b. Keluarga Berencana (KB);
- c. Keluarga Sejahtera, serta
- d. Standarisasi Pelayanan KB dan Sertifikasi Tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB).

Adanya perubahan lingkungan strategis seperti perubahan pemerintahan dengan segala perubahan perilaku manajemen pemerintahan negara, perubahan peraturan perundangan yang menjadi dasar penggerakan operasional program KKBPK sehingga mengubah beberapa kewenangan yang telah diserahkan ke daerah yang diatur melalui Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 dan dijadikan lampiran Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014. Perubahan lingkungan strategis antara lain, tingginya tingkat keterbukaan dan aspirasi masyarakat yang mendorong kesadaran akan pentingnya perubahan kelembagaan yang melaksanakan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sesuai amanat Undang–Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan 4 Keluarga dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang perubahan kedelapan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Sedangkan untuk kelembagaan di Kabupaten/Kota tetap merujuk pada ketentuan dalam Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Prinsip otonomi daerah dalam

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana merupakan langkah konkrit untuk mengatasi rentang kendali manajemen pelayanan program KB antara pemerintah dengan pemerintah daerah khususnya di Kabupaten/Kota. Hal ini tentunya dapat berjalan dengan baik apabila di dukung dengan peningkatan kualitas pelayanan pengendalian penduduk dan KB kepada masyarakat, yang diindikasikan dengan adanya keberpihakan ketersediaan infrastruktur instrumen regulasi yang mendukung penyelenggaraan program, penempatan Tenaga Penyuluh dan Pelayanan KB, rancang bangun program yang tertuang dalam Arah Kebijakan Umum Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Daerah (Renstrada) yang tergambar dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah - Keluarga Berencana (RKA SKPD-KB). Jika seluruh regulasi tersebut dapat disinkronkan secara harmonis, maka dapat dipastikan bahwa penyelenggaraan program semakin baik.

Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2015 - 2023 yang mengacu pada RPJMN 2023 - 2026 dan dijabarkan ke dalam struktur program dan anggaran melalui penetapan dan pelaksanaan program prioritas, perubahan manajemen secara berjenjang dengan penuh amanah, konsekuen dan berintegritas demi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana amanat perubahan reformasi birokrasi yang menyangkut 8 (delapan) area utama yakni :

- a. Organisasi;
- b. Tatalaksana;
- c. Peraturan Perundang – Undangan;
- d. Sumber daya manusia;
- e. Pengawasan;
- f. Akuntabilitas;
- g. Pelayanan publik, serta
- h. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dikaitkan dengan kebijakan prioritas dan sasaran pembangunan nasional, aka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana termasuk dalam bidang Sosial Budaya dan Kehidupan beragama yang diarahkan untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan meningkatnya Total Fertility Rate (TFR) sehingga Penduduk Tumbuh Seimbang. Pencapaian sasaran tersebut ditandai dengan terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kesejahteraan. Dalam rangka mencapai penduduk tumbuh seimbang yang ditandai dengan TFR 2.1 point dan NRR 1 point, maka kebijakan dan strategi

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

nasional yang ditetapkan adalah :

- a. Revitalisasi Program KB untuk menurunkan tingkat kelahiran dan menuju terbentuknya keluarga kecil berkualitas dengan strategi pembinaan dan peningkatan kemandirian Keluarga Berencana serta Promosi dan Penggerakkan Masyarakat.
- b. Penyerasian kebijakan pembangunan dengan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana untuk mewujudkan pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan kependudukan dengan strategi pengembangan dan sosialisasi kebijakan pembangunan kependudukan.
- c. Pemenuhan data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ditingkat nasional dan daerah serta mendorong terakomodasinya hak penduduk dan perlindungan sosial, dengan strategi penyediaan analisis data kependudukan yang bersumber pada sensus penduduk dan survei kependudukan serta peningkatan kualitas data dan informasi manajemen pembangunan kependudukan dan keluarga berencana berbasis teknologi informasi.

Sementara arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi Jawa Barat, urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mengacu pada prioritas meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan dengan kebijakan :

- a. Peningkatan Ketahanan Keluarga dan program Keluarga Berencana;
- b. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Ekonomi Keluarga;
- c. Peningkatan Pengelolaan Kependudukan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DANKELUARGA BERENCANA

Berdasarkan rumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis tahun 2024 - 2026 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi dan mengacu pada Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 125 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi, maka dirumuskan tujuan yaitu sesuai dengan Rencana Strategis Perubahan 2024-2026 sebagai berikut :

- 1. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk
 - a. Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera;
 - b. Meningkatkan Kesertaan ber KB;

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- c. Penurunan angka kelahiran di usia 15-19 tahun ;
 - d. Penurunan Persentase kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi (Unmet Need);
 - e. Pentingnya data pengendalian penduduk sebagai dasar pengambilan keputusan.
2. Mewujudkan akuntabilitas

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kota Bekasi maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Tahun 2024–2026 mempunyai indikator sasaran:

- 1. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan sasaran mempertahankan kesertaan ber -Kb
 - a. Presentasi balita stanting;
 - b. Media usia kawin pertama (MUKP) usia 25-49 Tahun;
 - c. Presentasi peserta KB aktif metode kontrasepsi jangka (MKJP);
 - d. Panjang Angka kelahiran remaja umur 15-19 Tahun (ASFR);
 - e. Angka prevalensi kontrasepsi moderen (mCPR);
 - f. Presentasi tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi;
 - g. Unmet Need (wanita kawin yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangkan kehamilan tetapi tidak menggunakan alat/cara kontrasepsi);
 - h. Indek pembangunan wawasan berkependudukan;
 - i. Presentasi kampung KB Mandiri;
 - j. Pesentasi masyarakat yang terjangkau program bangga kencana.
- 2. Mewujudkan Akutabilitas dengan sasaran Meningkatkan Akutabilitas Kinerja dan Profesionalisme Pengelolaan dan Pelayanan

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berecana Kota Bekasi

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Kinerja Sasaran			Target Akhir Rencana Strategis Perubahan
							2024	2025	2026	
1.	Mewujudkan akutabilitas	Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Akutabilitas Kinerja dan Profesionalisme Pengelolaan dan Pelayanan	Nilai AKIP	Persen	75.05	75.05	76	77	77
2.	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Mempertahankan kesertaan ber-KB	Pjumlah PPKS Aktif di Kecamatan	unit	6	8	10	12	12
				Presentase Cakupan anggota poktan yang ber KB	Persen	55	60	65	70	70

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan merupakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilansasaran dan tujuan. Program dimaksud merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Faktor- faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan:

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berecana Kota Bekasi Kota Bekasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mengacu pada tujuan dan saaran RPD Kota Bekasi 2024-2026 pembangunan Kota Bekasi pada Misi Ke -1 (satu) terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, dinamis dan akuntabel, sasaran meningkatnya akutabilitas dan profesinalisme pengelolaan dan layanan pemerintahan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akutabel serta ke-2 (dua) yaitu terwujudnya pembangunan manusia dan masyarakat yang berkualitas secara berkeadilan, sasaran meningkatkan kesejahteraan keluarga dan pembangunan responsif gender

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Strategi dan strategi dan arah kebijakan pembangunan dalam RPD Kota Bekasi tahun 2024-2026 yang berhubungan dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Lkeluarga Berencana Kota Bekasi adalah Gini Ratio, mempunyai tujuan meningkatkan keejahteraan keluarga dan pembagunan responsif gender, indikator kinerja indek pembangunan keluarga, strategi yang digunakan adalah memfasilitasi pembangunan keluarga ber-wirausaha dengan kerjasama antar pihak, arah kebijakan penguatan ketahanan keluarga dan mendorong kewirausahaan secara inklusif

Terkait dengan dengan tujuan yang ditetapkan adalah Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan cara:

1. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (KS).

Dengan Indikator yaitu:

- Presentasi balita stanting;
- Media usia kawin pertama (MUKP) usia 25-49 Tahun.

2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Dengan Indikator yaitu:

- Presentasi peserta KB aktif metode kontrasepsi jangka (MKJP);
- PanjangAngka kelahiran remaja umur 15-19 Tahun (ASFR);
- Angka prevalensi kontrasepsi moderen (mCPR);
- Presentasi tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi;
- Unmet Need (wanita kawin yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangkan kehamilan tetapi tidak menggunakan alat/cara kontrasepsi).

3. Program Pengendalian Penduduk,

Dengan Indikator yaitu:

- Indek pembangunan wawasan berkependudukan;
- Presentasi kampung KB Mandiri;
- Pesentasi masyarakat yang terjangkau program bangga kencana.

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akutabel serta dengan cara :

- 4. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan.

Adapun sasaran yang ditetapkan adalah Mempertahankan kesertaan ber-KB untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kota Bekasi maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Tahun 2024–2026 menyusun strategi sebagai berikut:

- Revitalisasi Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- Penyerasian kebijakan Pengendalian Penduduk;
- Peningkatan ketersediaan dan kualitas Data dan Informasi Kependudukan yang memadai akurat dan tepat waktu.

Arah Kebijakan operasional yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kota Bekasi adalah :

- Pemenuhan PLB dan PLKB serta PPKBD;
- Pendataan informasi data mikro keluarga setiap kelurahan ;
- Kelompok kegiatan yang melakukan 8 fungsi keluarga;
- Pembinaan dan Komunikasi Informasi dan Edukasitentang KB dan 8 fungsi keluarga;
- Melakukan pelayanan KB dengan bekerjama dengan sektor terkait;
- Melaksanakan pembentukan dan pembinaan UPPKA;
- Penambahan PPKS Aktif di Kecamatan.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan :

- 1. Jumlah Program, Kegiatan dan kebutuhan dana/pagu Indikatif.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pagu anggaran Rp. 31, 834,115,883, 00 dengan 4 Program, 12 Kegiatan.

- 2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan tersebar di 12 Kecamatan dengan UPTD

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

PP, mempunyai wilayah binaan 15 Kampung KB yang tersebar di seluruh wilayah Kota Bekasi.

- 3. Pogram dan Kegiatan sesuai dengan RKPD
- 4. Program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencan Kota Bekasi yang direncanakan untuk periode Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 3.3.1.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan maju Tahun 2025 Kota Bekasi

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			31,834,115,883.00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			31,834,115,883.00	
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			31,834,115,883.00	
1.	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	14,277,565,915.00	
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	205,000,000.00	

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7
	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	6 Dokumen	200,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	5 Laporan	5,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	12,054,576,400.00	
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	1372 Orang/bulan	12,049,576,400.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	1 Laporan	5,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	255,000,000.00	

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7
	2.14.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	8 Orang	85,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	6 Orang	170,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	700,592,875.00	
	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	2 Paket	400,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	2 Paket	20,592,875.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	12 Laporan	60,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	1 Laporan	170,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7
	2.14.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	4 Dokumen	50,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	150,000,000.00	
	2.14.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	5 Unit	150,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	244,926,640.00	
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	55,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	189,926,640.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	667,470,000.00	

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7
	2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	5 Unit	297,730,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	60 Unit	222,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	40 Unit	46,740,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	12 Unit	101,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-	-	450,000,000.00	

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-	-	100,000,000.00	
	2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk</i>	25 Unit	100,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	350,000,000.00	
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	<i>Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk</i>	25 Unit	100,000,000.00	-
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	<i>Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data</i>	1 dokumen	100,000,000.00	-

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7
	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain	<i>Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk</i>	25 Unit	150,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	<i>Presentasi peserta KB aktif metode kontrasepsi jangka (MKJP)</i>	100%	5,869,300,000.00	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	<i>Kegiatan advokasi program KKBPK pada steak holder dan mitra kerja serta Koordinasi wilayah (Minilokakarya Kecamatan dan Lomba)</i>	100%	1,848,715,000.00	
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)</i>	1 Laporan	680,400,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	<i>Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)</i>	12 Laporan	180,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	<i>Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang</i>	10 Dokumen	388,315,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	<i>Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan</i>	1 laporan Dokumen	600,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	<i>Meningkatnya Kopetensi Tenaga Pelayanan KBKR</i>	-	1,113,200,000.00	
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	<i>Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)</i>	112 Orang	350,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	<i>Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB</i>	1 laporan Organisasi	763,200,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2,642,135,000.00	
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</i>	1600 Orang	2,212,135,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	<i>Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi</i>	55 Orang	180,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	<i>Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria</i>	56 Orang	50,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.03.2.03.0014	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitas dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	<i>Jumlah Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan</i>	1 laporan Kab/Kota	125,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	<i>Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan</i>	60 Orang	75,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	-	265,250,000.00	
	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	<i>Jumlah DASHAT di Kampung KB</i>	15 Unit	265,250,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
4.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-	-	11,237,249,968.00	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	11,237,249,968.00	
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	<i>Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia</i>	108 Unit	440,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7
	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	<i>Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)</i>	1 Laporan	200,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	<i>Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan</i>	10 Orang	10,597,249,968.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	J U M L A H				31,834,115,883.00	

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENGEDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dalam Rencana Kerja 2025, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan melaksanakan program/kegiatan /sub kegiatan sebagai berikut:

- 4.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
- 1. KEGIATAN: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
SUB KEGIATAN: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 2. KEGIATAN: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
SUB KEGIATAN : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
 - 3. KEGIATAN: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
SUB KEGIATAN: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
SUB KEGIATAN: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
 - 4. KEGIATAN: Administrasi Umum Perangkat Daerah.
SUB KEGIATAN: Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
SUB KEGIATAN: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
SUB KEGIATAN: Fasilitas Kunjungan Tamu.
SUB KEGIATAN: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
SUB KEGIATAN: Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
 - 5. KEGIATAN: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
SUB KEGIATAN: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 6. KEGIATAN : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor..

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- 7. KEGIATAN: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 SUB KEGIATAN: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 SUB KEGIATAN : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

B. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA

- 1. KEGIATAN: Pemberdayaan dan peningkatan Peran serta Organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB
 SUB KEGIATAN: Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di KampungKB
- 2. KEGIATAN: Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 SUB KEGIATAN: Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
 SUB KEGIATAN: Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
- 3. KEGIATAN: Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
 SUB KEGIATAN: Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
 SUB KEGIATAN: Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
 SUB KEGIATAN: Peningkatan Kesertaan KB Pria
 SUB KEGIATAN: Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan
 SUB KEGIATAN: Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan
- 4. KEGIATAN: emberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan SUB KEGIATAN: Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB"
 SUB KEGIATAN: Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas
- 5. KEGIATAN: Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Budaya Lokal
 SUB KEGIATAN: Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Masa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang

SUB KEGIATAN: Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana

SUB KEGIATAN: Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)

SUB KEGIATAN: Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang

C. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

- KEGIATAN: Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk.
 SUB KEGIATAN: Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingka Kabupaten/Kota.
- KEGIATAN: Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 SUB KEGIATAN : Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
 SUB KEGIATAN : Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
 SUB KEGIATAN : Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain

D. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAKAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

- KEGIATAN : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- SUB KEGIATAN: Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 SUB KEGIATAN : Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
 SUB KEGIATAN : Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
 SUB KEGIATAN : Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2025, disajikan dalam table sebagai berikut :

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 4. 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DPPKB Kota Bekasi dan Perkiraan maju Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			31,834,115,883.00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			31,834,115,883.00	
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			31,834,115,883.00	

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

1.	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Terpenuhinya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100%	14,277,565,915.00	
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	205,000,000.00	
	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	6 Dokumen	200,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	5 Laporan	5,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	12,054,576,400.00	

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	1372 Orang/bulan	12,049,576,400.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	1 Laporan	5,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	255,000,000.00	
	2.14.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	8 Orang	85,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	6 Orang	170,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	700,592,875.00	
	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	2 Paket	400,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	2 Paket	20,592,875.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	12 Laporan	60,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	1 Laporan	170,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	4 Dokumen	50,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	150,000,000.00	

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

	2.14.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	5 Unit	150,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	244,926,640.00	
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	55,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	189,926,640.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	667,470,000.00	

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

	2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	5 Unit	297,730,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	60 Unit	222,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	40 Unit	46,740,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	12 Unit	101,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-	-	450,000,000.00	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-	-	100,000,000.00	
	2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk</i>	25 Unit	100,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	350,000,000.00	

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	<i>Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk</i>	25 Unit	100,000,000.00	-
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	<i>Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data</i>	1 dokumen	100,000,000.00	-
	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	<i>Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk</i>	25 Unit	150,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	<i>Presentasi peserta KB aktif metode kontrasepsi jangka (MKJP)</i>	100%	5,869,300,000.00	

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	<i>Kegiatan advokasi program KKBPK pada steak holder dan mitra kerja serta Koordinasi wilayah (Minilokakarya Kecamatan dan Lomba)</i>	100%	1,848,715,000.00	
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)</i>	1 Laporan	680,400,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	<i>Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)</i>	12 Laporan	180,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	<i>Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang</i>	10 Dokumen	388,315,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	<i>Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan</i>	1 laporan Dokumen	600,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	<i>Meningkatnya Kopetensi Tenaga Pelayanan KBKR</i>	-	1,113,200,000.00	
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	<i>Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)</i>	112 Orang	350,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	<i>Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB</i>	1 laporan Organisasi	763,200,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2,642,135,000.00	
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</i>	1600 Orang	2,212,135,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

	2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	<i>Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi</i>	55 Orang	180,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	<i>Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria</i>	56 Orang	50,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.03.2.03.0014	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitas dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	<i>Jumlah Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan</i>	1 laporan Kab/Kota	125,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	<i>Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan</i>	60 Orang	75,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	-	265,250,000.00	
	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	<i>Jumlah DASHAT di Kampung KB</i>	15 Unit	265,250,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
4.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-	-	11,237,249,968.00	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	11,237,249,968.00	

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	<i>Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia</i>	108 Unit	440,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	<i>Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)</i>	1 Laporan	200,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	<i>Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan</i>	10 Orang	10,597,249,968.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	J U M L A H				31,834,115,883.00	

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 di lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2025 sesuai dengan tujuan dan sasaran RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Isi dokumen Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2025 diharapkan mampu diaplikasikan oleh seluruh unsur internal Dinas serta diikuti dengan upaya-upaya pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh target pembangunan tahun 2025.

Proses penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Tahun 2025 mempertimbangkan potensi sumber daya yang dibutuhkan dalam menghadapi isu-isu dan permasalahan yang telah teridentifikasi sehingga diharapkan akan mampu menjawab permasalahan dan memperbaiki kualitas *output* perencanaan dan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap capaian kinerja yang dilakukan oleh berbagai komponen pemerintah daerah.

Proses penyusunan Renja ini memerlukan keterlibatan dari seluruh elemen yang terkait dan berkepentingan dengan organisasi baik dari internal maupun eksternal organisasi. Keterlibatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan motivasi lembaga untuk melaksanakan program dan kegiatan indikatif yang terdapat dalam Renja secara fokus dan konsisten serta meningkatkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Adapun kaidah pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Tahun 2025 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi dengan Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi;
2. Seluruh komponen bidang, sub bidang dan sub bagian pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi agar melaksanakan program dan kegiatan dalam Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya;

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

3. Program-program yang tercantum dalam Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Tahun 2025 diupayakan untuk dilaksanakan seluruhnya dengan memperhatikan prioritas pembangunan serta ketersediaan anggaran;
4. Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Tahun 2025 disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai dan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD);
5. Agar Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Tahun 2025 dapat dilaksanakan dan memberikan hasil yang diharapkan, maka setiap komponen Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi diharapkan mengupayakan penguatan peran *stakeholder* dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target-target Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Tahun 2025, baik kepada seluruh komponen aparat yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Instansi terkait maupun masyarakat luas;
6. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Tahun 2025, dipandang perlu untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Tahun 2025, sebagaiberikut:
 - a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masingbidang;
 - b. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing bidang sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - c. Kepala bidang melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja bidang periode sebelumnya;
 - d. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi menyusun evaluasi Renja berdasarkan hasil evaluasi bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada huruf (c);
 - e. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menjadi bahan bagi penyusunan Renja untuk periode berikutnya;
 - f. Apabila terjadi perubahan kebijakan daerah maupun kebijakan nasional selama tahun 2025, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi akan melakukan perubahan-perubahan demi kesempurnaan Renja ini.

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Rencana tindak lanjut Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi pada tahun 2025 akan melaksanakan:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2. Program Pengendalian Penduduk
- 3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
- 4. Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Kota Bekasi . Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Semoga Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2025 ini dapat dijadikan bahan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kota Bekasi tahun 2025. Akhirnya, ucapan terimakasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunandokumen ini.

Ditetapkan di :
Bekasi Tanggal : 4 September 2024
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Bekasi


Dra. IKA INDAH YARTI, M.Si
Pembina Utama / IVc
NIP. 19670114198610 2 001

PARAF KOORDINASI :	
Kepala DPPKB	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	